





Oleh:  
**Haryadi Suyuti**  
Wali Kota Yogyakarta

### Kolom Pak Wali...

## Kawasan Kumuh dan Hunian Vertikal

YOGYAKARTA — Sebagai kota pariwisata dan pendidikan, Kota Yogyakarta tidaklah terlepas dari keberadaan kawasan kumuh atau tak layak huni bagi masyarakat. Kawasan ini sendiri sudah ada seiring dengan pembangunan dan perkembangan kota ini sejak dulu. Meski berbagai intervensi telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta bersama pihak swasta dan pemerintah provinsi, namun keberadaan kawasan tak layak huni ini masih saja menjadi pekerjaan rumah yang tak terselesaikan dalam waktu dekat. Kawasan kumuh di Kota Yogyakarta sendiri sebagian besar berada di wilayah bantaran sungai, terutama di bantaran sungai besar, yaitu Code, Gajah Wong, dan Winongo.

Sejak dua tahun terakhir, kita telah menggandeng masyarakat sebagai motor penggerak dalam pengentasan kawasan kumuh ini menjadi layak huni. Beberapa titik program pembangunan dilakukan berdasarkan usulan masyarakat di kawasan itu sendiri. Hasilnya cukup menggembirakan. Beberapa titik di bantaran sungai di Kota Yogyakarta disulap menjadi tujuan wisata baru dan tempat berkumpul keluarga maupun masyarakat yang cukup nyaman. Namun, ke depan seiring perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk, program tersebut tidaklah cukup. Kebutuhan hunian yang semakin meningkat, sementara luasan wilayah yang tetap, akan menjadi masalah tersendiri bagi munculnya kawasan kumuh yang baru. Karenanya, hunian vertikal atau rusun akan menjadi salah satu jawaban bagi pengentasan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta. Kebutuhan hunian yang layak tidak sebanding dengan ketersediaan lahan di Kota Yogyakarta ini. Akibatnya, harga lahan menjadi sangat mahal dan akan semakin sulit dijangkau. Melihat kondisi ini, kita tengah menyiapkan regulasi terhadap kebutuhan hunian vertikal itu sendiri. Selain regulasi sebagai landasan pembangunan hunian vertikal, kita juga akan melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memungkinkan dibangunnya hunian vertikal ini. Harapannya, masyarakat di kawasan kumuh bisa memiliki hunian layak dan sehat melalui pembangunan hunian vertikal tersebut.

Namun di satu sisi, kawasan bantaran sungai bisa dimanfaatkan bagi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, baik untuk keberlangsungan sungai itu sendiri maupun masyarakat sekitar, bukan memindahkan kawasan kumuh ke hunian vertikal untuk menyediakan lahan bagi kawasan kumuh lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, tentu dibutuhkan peran serta masyarakat secara aktif termasuk pihak swasta. Dengan peran bersama, kita optimistis kawasan kumuh di Kota Yogyakarta bisa terus diminimalisasi dan bantaran sungai bisa ditata untuk konservasi lingkungan.

*Salam Indonesia, salam Yogyakarta, salam Haryadi Suyuti.*

Sejak dua tahun terakhir, kita telah menggandeng masyarakat sebagai motor penggerak dalam pengentasan kawasan kumuh ini menjadi layak huni. Beberapa titik program pembangunan dilakukan berdasarkan usulan masyarakat di kawasan itu sendiri. Hasilnya cukup menggembirakan. Beberapa titik di bantaran sungai di Kota Yogyakarta disulap menjadi tujuan wisata baru dan tempat berkumpul keluarga maupun masyarakat yang cukup nyaman. Namun, ke depan seiring perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk, program tersebut tidaklah cukup. Kebutuhan hunian yang semakin meningkat, sementara luasan wilayah yang tetap, akan menjadi masalah tersendiri bagi munculnya kawasan kumuh yang baru. Karenanya, hunian vertikal atau rusun akan menjadi salah satu jawaban bagi pengentasan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta. Kebutuhan hunian yang layak tidak sebanding dengan ketersediaan lahan di Kota Yogyakarta ini. Akibatnya, harga lahan menjadi sangat mahal dan akan semakin sulit dijangkau. Melihat kondisi ini, kita tengah menyiapkan regulasi terhadap kebutuhan hunian vertikal itu sendiri. Selain regulasi sebagai landasan pembangunan hunian vertikal, kita juga akan melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memungkinkan dibangunnya hunian vertikal ini. Harapannya, masyarakat di kawasan kumuh bisa memiliki hunian layak dan sehat melalui pembangunan hunian vertikal tersebut.

Namun di satu sisi, kawasan bantaran sungai bisa dimanfaatkan bagi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, baik untuk keberlangsungan sungai itu sendiri maupun masyarakat sekitar, bukan memindahkan kawasan kumuh ke hunian vertikal untuk menyediakan lahan bagi kawasan kumuh lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, tentu dibutuhkan peran serta masyarakat secara aktif termasuk pihak swasta. Dengan peran bersama, kita optimistis kawasan kumuh di Kota Yogyakarta bisa terus diminimalisasi dan bantaran sungai bisa ditata untuk konservasi lingkungan.

*Salam Indonesia, salam Yogyakarta, salam Haryadi Suyuti.*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005